

ABSTRAK

BOBBY ANDREANATA RAHMAN, NPM : 2022232, JUDUL “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ASET TERHADAP BANGUNAN SEKOLAH YANG TIDAK DIFUNGSIKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI DESA PAMINTANGAN, KECAMATAN AMUNTAI UTARA)” di bawah bimbingan Bapak **Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.Ap** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Moh. Fajar Noorrahman, M.Psi** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini menggunakan SDN Desa Pamintangan sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana kebijakan pemanfaatan aset pemerintah daerah diterapkan terhadap bangunan sekolah yang tidak difungsikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus utama penelitian ini adalah bangunan sekolah yang tidak digunakan sejak tahun 2014. Ini terjadi karena jumlah siswa yang menurun dan status kepemilikan lahan yang timpang tindih, di mana bangunan pemerintah daerah terletak di atas tanah milik warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemanfaatan aset diterapkan, serta untuk menemukan elemen yang mendukung dan menghambat proses tersebut.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Untuk melakukan analisis data, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan. Model ini mencakup enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar-organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan aset di SDN Pamintangan kurang dilaksanakan. Meskipun tujuan administratif jelas, kebijakan ini tidak mungkin karena tidak ada petunjuk teknis yang terkait dengan aset di tanah milik warga. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya anggaran karena tidak ada sertifikat tanah dan koordinasi yang tidak efektif di tingkat pemerintah desa. Selain itu, lingkungan sosial masyarakat lebih memilih pendidikan berbasis pesantren daripada menghidupkan kembali sekolah, dan sikap pelaksana cenderung pasif.

Peneliti mengusulkan agar pemerintah daerah segera membuat peraturan teknis atau wewenang khusus untuk menyelesaikan aset bangunan yang terletak di tanah warga. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk mendiskusikan opsi hibah atau tukar guling agar bangunan dapat digunakan kembali untuk kepentingan komunitas desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Aset Daerah, SDN Pamintangan

ABSTRACT

BOBBY ANDREANATA RAHMAN, NPM: 2022232, Title: “IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN ASSET UTILIZATION OF NON-FUNCTIONAL SCHOOL BUILDINGS IN NORTH HULU SUNGAI REGENCY (CASE STUDY OF PAMINTANGAN VILLAGE STATE ELEMENTARY SCHOOL, NORTH AMUNTAI DISTRICT)” under the guidance of Mr. Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP. as Advisor I and Mr. Moh. Fajar Noorrahman, M.Psi. as Advisor II.

Using SDN Desa Pamintangan as a case study, this paper investigates the application of the regional government's asset use policy to Hulu Sungai Utara Regency's non-operational school buildings. This study's primary focus is the school building, which hasn't been in use since 2014. This occurred as a result of both the dwindling student body and the overlapping land ownership status—the local government building is located on resident-owned land. Understanding the implementation of asset usage rules and identifying the factors that facilitate and impede the process are the goals of this study.

A qualitative descriptive method was used in the investigation. Documentation, in-depth interviews, and observation were used to gather data. The Van Meter and Van Horn policy implementation model is employed to analyze the data. The scale and goals of the policy, resources, the traits of implementing agents, the personalities of implementers, inter-organizational communication, and the political, social, and economic environment are the six elements that make up this model.

According to research, SDN Pamintangan's asset usage policy is not being executed well. The lack of technical norms pertaining to assets on resident-owned land makes this strategy unfeasible, despite the apparent administrative aims. Due to the lack of land certificates and poor coordination at the village government level, one of the primary problems is the lack of financial resources. Additionally, the implementers are typically passive, and the community's social context favors pesantren-based schooling over reviving schools.

The researchers suggest that in order to address the issue of building assets situated on private property, the local government should promptly establish technical norms or special authorities. In order to repurpose the structures for the benefit of the village community, the local government should also take the initiative to get in touch with landowners and talk about grant or swap options.

Keywords: Implementation, Public Policy, Regional Assets, SDN Pamintangan